

## RINGKASAN

PASCA PUJA ESTRYANA, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Pengalihan Saham Atas Harta Bersama Di Perseroan Terbatas Melalui Notaris (Studi Putusan Nomor 270 K/Pdt/2016), Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. Kartono S.H., M.H. dan anggota Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh suami dan isteri. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara implisit dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan dibagi kepada 2 jenis, yaitu: harta bersama dan harta bawaan. Mencermati konsep dalam korporasi, maka kepemilikan saham oleh suami isteri memiliki beberapa permasalahan hukum baik dari segi keabsahannya maupun implikasi yuridisnya terhadap harta kekayaan. Masalah semakin mengemuka manakala salah satu pasangan melakukan jual beli saham perseroan terbatas tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan salah satu pasangan. Salah satu kasus yang terjadi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 270 K/Pdt/2016, terdapat perbedaan yang signifikan antara ketentuan undang-undang perkawinan terkait penjualan harta bersama harus disetujui oleh pasangan suami isteri, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sama sekali tidak diatur terkait jual beli saham terhadap harta bersama dalam perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme peralihan saham yang merupakan harta bersama di perseroan terbatas dan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam pengalihan saham yang merupakan harta bersama pada perseroan terbatas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan Spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Penulisan menggunakan Sumber data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode Pengumpulan Bahan Hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dengan metode penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif deskripsi. Analisis Data dianalisis secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian tesis ini adalah mekanisme peralihan saham yang merupakan harta bersama di perseroan terbatas, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/Pdt/2016, mekanisme peralihan saham pada perseroan berupa harta bersama seharusnya diawali dengan adanya penawaran terlebih dahulu selanjutnya dilakukan pengalihan saham dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat dihadapan notaris atau akta dibawah tangan didalam pengalihan tersebut diperlukan persetujuan dari organ PT yakni RUPS sedangkan terkait dengan kepemilikan saham berupa harta bersama, menurut UU Perkawinan perlu adanya persetujuan dari pasangan dibuktikan dengan surat persetujuan dari suami atau istri yang bertindak dalam kepemilikan harta bersama berupa saham. Setelah terjadinya pengalihan saham maka direksi wajib mencatat dan memberitahukan pemindahan hak atas saham tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Kewenangan Notaris dalam peralihan saham yang merupakan harta Bersama pada perseroan terbatas, Notaris wajib memeriksa dan mengecek syarat-syarat yang dipenuhi dalam hal kepemilikan saham berupa harta bersama Notaris mengecek dokumen-dokumen seperti bukti persetujuan dari pasangan suami atau isteri. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/Pdt/2016, Notaris terbukti telah melanggar kewenangan dan kewajiban seorang notaris, yaitu tidak teliti dalam pengecekan mengenai syarat formil seperti tidak adanya bukti persetujuan dari pasangan suami isteri mengenai kepemilikan saham berupa harta bersama yang dibawa oleh penghadap sehingga akta peralihan saham tersebut cacat hukum dan dibatalkan oleh pengadilan, dengan demikian notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi.

Kata Kunci : Notaris , Saham , Harta Bersama Perkawinan, Perseroan Terbatas

## SUMMARY

PASCA PUJA ESTRYANA, Notarial Masters Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Juridical Analysis of Transfer of Shares in the Form of Joint Assets in a Limited Liability Company Advisory Commission, Chairman : Dr. Kartono S.H., M.H. and members Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

Share ownership owned by husband and wife. According to the Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is implicitly explained that marital assets are divided into 2 types, namely: joint assets and inherited assets. Observing the concept in corporations, the ownership of shares by husband and wife has several legal problems both in terms of its validity and juridical implications for assets. The problem is getting to the fore when one of the spouses buys and sells the limited liability company's shares without the knowledge or consent of either partner. One of the cases that occurred based on the Supreme Court Decision Number: 270 K/Pdt/2016, there is a significant difference between the provisions of the marriage law regarding the sale of joint assets that must be approved by the husband and wife, whereas in Law Number 40 of 2007 concerning Companies Limited, absolutely not regulated regarding the sale and purchase of shares of joint assets in marriage.

This study aims to analyze the mechanism of transferring shares which are joint assets in a limited liability company and to analyze the role of a notary in transferring shares which are joint assets in a limited liability company. This study uses a normative juridical method with prescriptive research specifications. Writing using secondary data sources as sources or information materials can be primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Methods for collecting legal materials using literature studies with the method of presenting data presented in the form of descriptive narrative text. Analysis Data were analyzed normatively qualitatively.

The research results obtained in this thesis research are the mechanism for the transfer of shares which are joint assets in a limited liability company, in the Supreme Court Decision Number 270 K / Pdt / 2016, the mechanism for transferring shares in a company in the form of joint assets should begin with an offer first, then transfer shares in the form of a notarial deed or a deed drawn up before a notary or underhanded deed in the transfer requires approval from the PT organ, namely the GMS, while in relation to share ownership in the form of joint assets, according to the Marriage Law, approval from the spouse is required as evidenced by a letter of approval from the husband or wife acting in the ownership of joint assets in the form of shares. After the transfer of shares occurs, the board of directors must record and notify the transfer of rights over said shares to the Ministry of Justice and Human Rights.

The role of the notary in transferring shares which are joint property in a limited liability company, the notary is obliged to check and check the conditions met in terms of share ownership in the form of joint property. The notary checks documents such as evidence of consent from the husband or wife. In the Supreme Court Decision Number 270 K/Pdt/2016, the Notary was proven to have violated the authority and obligations of a notary, namely not being thorough in checking regarding formal requirements such as the absence of evidence of consent from the husband and wife regarding share ownership in the form of joint assets brought by the appearer so that the deed of transfer of shares is legally flawed and canceled by the court, thus the notary can be sued to provide compensation, as long as this occurs due to the notary's fault.

Keywords: Notary, Shares, Marital Joint Assets, Limited Liability Company